



KEMENTERIAN  
LINGKUNGAN HIDUP & KEHUTANAN  
REPUBLIK INDONESIA

# RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN



# Kata Pengantar

Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Ditjen Gakkum KLHK) Tahun 2024 ini merinci seluruh kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Ditjen Gakkum KLHK dalam jangka waktu satu tahun, dengan penjadwalan dan koordinasi yang terstruktur.

Harapannya, Rencana Aksi Perjanjian Kinerja ini akan menjadi pedoman pelaksanaan rencana kerja Ditjen Gakkum KLHK dan menjadi landasan untuk melaksanakan monitoring serta evaluasi pelaksanaan rencana kerja tersebut.

Melalui dokumen ini, diharapkan dukungan bagi optimalisasi peran Ditjen Gakkum KLHK dalam meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja seluruh jajaran di lingkungan Ditjen Gakkum KLHK dapat terwujud.



Dr. Rasio Ridho Sani, M.Com., MPM  
NIP. 196607111992031018

**RENCANA AKSI**  
**DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**  
**TAHUN 2024**

1	Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama/Program	Kegiatan Pendukung	Anggaran/ Pagu (Rp.000)	Satuan Output	Target Output	Target Output Balasan			
							TW I	TW II	TW III	TW IV
1	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)								
1.A	Meningkatnya Budaya Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan bidang LHK	Persentase Pemegang Izin yang taat terhadap Peraturan Terkait bidang LHK		32.750.000	Persen	53	13	35	45	53
1.A.1	Meningkatnya pelaku usaha/kegiatan yang diawasi terhadap perizinan dan peraturan perundang-undangan bidang LHK	Jumlah Usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap PUU Bidang LHK	Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan (PPSALHK)	30.750.000	Badan Usaha	800	137	379	625	800
1.A.2		Jumlah PPLH yang ditingkatkan kapasitasnya		2.000.000	Orang	250	70	150	210	250
1.B	Terselesaikannya Kasus Penegakan Hukum Bidang LHK	Jumlah Kasus Pidana dan Perdata yang ditangani		92.154.694	Kasus	225	37	88	153	225
1.B.1	Meningkatnya kasus tindak pidana lingkungan hidup dan kehutanan yang diselesaikan sampai dengan P21	Jumlah kasus pidana LHK yang diselesaikan sampai dengan P21/berkas perkara dinyatakan lengkap	Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan(PHPLHK)	57.114.694	Perkara	180	32	76	125	180
1.B.2		Jumlah Berkas penyelesaian permasalahan penggunaan kawasan hutan		14.400.000	Perkara	150	5	52	68	150
1.B.3		Jumlah PPNS yang ditingkatkan kapasitasnya		3.400.000	Orang	200	0	30	100	200
1.B.4	Meningkatnya perkara sengketa lingkungan hidup yang diselesaikan melalui pengadilan dan di luar pengadilan	Jumlah Sengketa Lingkungan Hidup yang diselesaikan melalui pengadilan dan di luar pengadilan	Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup (PSLH)	17.240.000	Perkara	45	5	12	28	45
2	Menurunnya Laju Penyusutan Hutan	Laju Deforestasi dan Degradasi Hutan								
2.A	Meningkatnya Pengamanan Hutan dan Gangguan dan Ancaman	Luas Hutan yang diamankan dari gangguan dan ancaman		78.227.339	Hektar	1,2 Juta	200 Ribu	600 Ribu	900 Ribu	1,2 Juta
2.A.1	Meningkatnya operasi pengamanan hutan, perusakan lingkungan hidup dan peredaran hasil hutan	Jumlah operasi pengamanan hutan dan penindakan kerusakan lingkungan hidup	Pencegahan dan Pengamanan Lingkungan Hidup dan Kehutanan (PPLHK)	39.570.800	Operasi	100	21	49	78	100
2.A.2		Jumlah operasi pembalakan liar, tumbuhan dan satwa liar		35.656.539	Operasi	80	19	40	63	80
2.A.3		Jumlah Polhut yang ditingkatkan kapasitasnya		3.000.000	Orang	300	5	110	216	300
3	Meningkatnya Birokrasi dan Layanan Publik yang Agile, Efektif dan Efisien	Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi								
3.1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kementerian LHK	Nilai SAKIP		301.339.685	Poin	80	10%	35%	75%	100%
3.2		Nilai NKA			Poin	98,12	10%	35%	75%	100%
	Meningkatnya Kondisi Birokrasi dan Layanan Publik yang agile, efektif dan efisien lingkupp Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Layanan Dukungan Manajemen Internal	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Teknis lainnya Direktorat Jenderal PHLHK (DUKMAN)							
		Layanan Umum		32.438.277	Layanan	6	10%	35%	75%	100%
		Layanan Perkantoran		200.844.508	Layanan	6	10%	35%	75%	100%
		Layanan Sarana dan Prasarana Internal								
		Layanan Sarana Internal		68.056.900	Layanan	6	10%	35%	75%	100%



Dr. Rasio Ridho Sani, M.Com., MPM  
NIP. 196607111992031018

# RENCANA AKSI

## DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

### TAHUN 2024

Sasaran Strategis/ Sasaran Program/Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama/ Program	Anggaran/ Pagu ('000)	Satuan Output	Target Output	Target Output Balasan												
					Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des	
1	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)														
1.A	Meningkatnya Budaya Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan bidang LHK	32.750.000	Persen	53	5	10	13	18	25	35	38	41	45	47	51	53	
1.A.1	Meningkatnya pelaku usaha/kegiatan yang diawasi terhadap perizinan dan peraturan perundang-undangan bidang LHK	30.750.000	Badan Usaha	800	20	75	137	180	270	379	475	555	625	675	750	800	
1.A.2	Terselesaikannya Kasus Penegakan Hukum bidang LHK	2.000.000	Orang	250	0	0	70	0	0	150	0	0	210	0	0	250	
1.B	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang diselesaikan sampai dengan P21	92.154.694	Kasus	225	5	15	37	45	65	88	112	135	153	175	195	225	
1.B.1	Meningkatnya kasus tindak pidana lingkungan hidup dan kehutanan yang diselesaikan sampai dengan P21	57.114.694	Perkara	180	10	20	32	45	65	76	90	105	125	145	160	180	
1.B.2	Meningkatnya kasus tindak pidana lingkungan hidup dan kehutanan yang diselesaikan sampai dengan P21	14.400.000	Perkara	150	2	4	5	20	40	52	58	62	68	90	120	150	
1.B.3	Meningkatnya kasus tindak pidana lingkungan hidup dan kehutanan yang diselesaikan sampai dengan P21	3.400.000	Orang	200	0	0	0	0	0	30	0	0	100	140	180	200	
1.B.4	Meningkatnya perkara sengketa lingkungan hidup yang diselesaikan melalui dan di luar pengadilan	17.240.000	Perkara	45	2	4	5	7	9	12	18	22	28	35	38	45	
2	Menurunnya Laju Penyusutan Hutan		Laju Deforestasi dan Degradasi Hutan														
2.A	Meningkatnya Pengamanan Hutan dan Gangguan dan Ancaman	78.227.339	Hektar	1,2 Juta	50 Ribu	100 Ribu	200 Ribu	350 Ribu	500 Ribu	600 Ribu	700 Ribu	800 Ribu	900 Ribu	1,05 Juta	1,1 Juta	1,2 Juta	
2.A.1	Meningkatnya operasi pengamanan hutan, perusakan lingkungan hidup dan peredaran hasil hutan	39.570.800	Operasi	100	5	10	21	30	39	49	59	68	78	85	92	100	
2.A.2	Meningkatnya operasi pengamanan hutan, perusakan lingkungan hidup dan peredaran hasil hutan	35.656.539	Operasi	80	5	10	19	25	38	40	48	56	63	68	74	80	
2.A.3	Meningkatnya operasi pengamanan hutan, perusakan lingkungan hidup dan peredaran hasil hutan	3.000.000	Orang	300	0	0	5	0	0	110	0	0	216	0	0	300	
3	Meningkatnya Birokrasi dan Layanan Publik yang Agile, Efektif dan Efisien		Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi														
3.A	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kementerian LHK	301.339.685	Poin	80	2%	5%	10%	15%	25%	35%	45%	55%	75%	80%	90%	100%	
3.B	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kementerian LHK		Poin	98,12	2%	5%	10%	15%	25%	35%	45%	55%	75%	80%	90%	100%	
	Meningkatnya Kondisi Birokrasi dan Layanan Publik yang agile, efektif dan efisien lingkup Ditjen PHLHK		Layanan Dukungan Manajemen Internal														
		32.438.277	Layanan Umum	6	2%	5%	10%	15%	25%	35%	45%	55%	75%	80%	90%	100%	
		200.844.508	Layanan Perkantoran	6	2%	5%	10%	15%	25%	35%	45%	55%	75%	80%	90%	100%	
			Layanan Sarana dan Prasarana Internal														
		68.056.900	Layanan Sarana Internal	6	2%	5%	10%	15%	25%	35%	45%	55%	75%	80%	90%	100%	



Dr. Rasio Ridho Sani, M.Com., MPM  
NIP. 196607111992031018



# Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2024

